

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG
KELAUTAN

AKD: RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014
TENTANG KELAUTAN

Bulan: Mei 2023

Oleh:

GAMBAR

**PERPUSTAKAAN
DPR RI**

Telepon : (021) 5715876, 5715817, 5715887

Fax : (021) 5715846

e-mail: perpustakaan@dpr.go.id

Web: perpustakaan.dpr.go.id

Indonesia Maritime Institute (IMI) mendesak DPR RI untuk segera menyelesaikan dan mengesahkan RUU Kelautan.

"Undang-Undang Kelautan merupakan hal yang sangat vital bagi republik ini, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia," kata Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Institute, Paongan, di Jakarta, Minggu (19/9).

RUU Kelautan merupakan program legislasi DPR RI yang harusnya selesai dalam tahun 2010 sesuai dengan Prolegnas 2010 – 2014, namun hingga kini belum ada pembahasan konprehensif yang dilakukan oleh DPR RI khususnya Komisi IV yang membidangi masalah kelautan.

Paongan menuturkan, letak geografis Indonesia yang sangat strategis karena merupakan lalu lintas perdagangan dunia, sehingga diperlukan suatu kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut Indonesia secara maksimal untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Ditambahkannya, sumber daya alam hayati dan non hayati yang melimpah harusnya bisa termanfaatkan secara optimal, belum lagi laut sebagai media perhubungan, pertahanan yang sangat strategis. "Deklarasi Djuanda tahun 1957 dan UNCLOS 1982 menempatkan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan potensi ekonomi maritim sangat besar," papar dia.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah laut seluas 5,8 juta km² yang terdiri dari wilayah teritorial sebesar 3,2 juta km persegi dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta km². Selain itu, terdapat 17.840 pulau di Indonesia dengan garis pantai sepanjang 95.181 km. Dengan cakupan yang demikian besar dan luas, tentu saja maritim Indonesia mengandung keanekaragaman sumberdaya alam laut yang potensial, baik hayati dan non-hayati.

Konsep Negara Kepulauan (Nusantara) memberikan kita anugerah yang luar biasa. Letak geografis kita strategis, di antara dua benua dan dua samudra dimana paling tidak 70 persen angkutan barang melalui laut dari Eropa, Timur Tengah dan Asia Selatan ke wilayah Pasifik, dan sebaliknya, harus melalui perairan kita.

"Wilayah laut yang demikian luas dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 buah, tentunya memberikan nilai yang luar biasa pada sumber daya alam seperti ikan, terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wilayah wisata bahari, sumber energi terbarukan maupun minyak dan gas bumi, mineral langka dan juga media transportasi antar pulau yang sangat ekonomis," tandas Paongan.

Sumber: Primaironline

JENIS	KETERANGAN	URL
Berita	Buku Putih, Pedoman Wujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia	https://www.kompas.id/baca/utamanama/2018/11/13/buku-putih-pedoman-wujudkan-indonesia-poros-maritim-dunia
Berita	Kilas Berita Hukum dan Peraturan Perundang-undangan DPR DIDESAK SEGERA BAHAS RUU KELAUTAN	https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=756:dpr-didesak-segera-bahas-ruu-kelautan&catid=111:kilas-berita-hukum-dan-puu&Itemid=179&lang=en
Berita	Pemanfaatan Teknologi Kelautan Meningkatkan Produktivitas	https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/02/24/pemanfaatan-teknologi-demi-meningkatkan-produktivitas
Buku	Ekonomi Maritim Indonesia	https://senin032023.dpr.go.id/public/api/catalog/index.php?pn=show_detail&id=32686&keywords=kelautan
Buku	Laut : masa depan bangsa	https://senin032023.dpr.go.id/public/api/catalog/index.php?pn=show_detail&id=32606&keywords=kelautan
Buku	Laut Masa Depan Bangsa: Transformasi Kelautan dan Perikanan 2014-2019	https://senin032023.dpr.go.id/public/api/catalog/index.php?pn=show_detail&id=32944&keywords=kelautan
Dokumen	DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KELAUTAN	https://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20181022-050528-2560.pdf
Undang-undang & Peraturan	RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KELAUTAN	https://www.dpr.go.id/arsip/indexlg/id/396